



Research Article

Received: 3 July 2020, Revised: 17 July 2020, Accepted: 17 September 2020, Published: 17 November 2020

Pendidikan Agama dalam Meresolusi Pemikiran Radikalisme di Pesantren

Fatkuroji¹

¹Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia

ABSTRAK:

Konflik antarumat beragama merupakan fenomena historis yang kompleks dan masih berlangsung hingga kini. Di tengah meningkatnya stereotip terhadap Islam sebagai agama radikal, lembaga pendidikan Islam seperti pesantren memiliki peran strategis dalam meredam potensi radikalisme dan membangun kerukunan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model manajemen resolusi konflik dan peran pendidikan agama di pesantren dalam menanggulangi pemikiran radikal serta menguatkan moderasi beragama. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan telaah pustaka dan analisis teoritis terhadap konflik keagamaan, teori manajemen konflik, serta hasil observasi di beberapa pesantren di Jawa Tengah. Kajian pustaka mencakup berbagai teori konflik dari Coser, Boulding, dan Galtung, serta studi perbandingan dari Freedman (2019), Luo et al. (2010), dan Paul Ilo (2014) mengenai peran pemimpin dan lembaga keagamaan dalam penyelesaian konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik di lingkungan pesantren umumnya bersumber dari perbedaan pandangan keagamaan, interpretasi ajaran, serta interaksi sosial antara santri dan masyarakat eksternal. Untuk itu, pesantren mengembangkan tiga model manajemen resolusi konflik, yaitu: 1) Pendekatan Edukatif-Dialogis, melalui pengajaran nilai toleransi dan moderasi dalam halaqah serta mudzarah yang melibatkan berbagai kelompok pemikiran Islam; 2) Manajemen Partisipatif-Transformasional, dengan melibatkan seluruh elemen pesantren dalam pengambilan keputusan, membangun kepemimpinan kyai yang inklusif, dan menanamkan nilai *rahmatan lil 'alamin*. 3) Pendekatan Sosio-Kultural Rekonsiliatif, yaitu rekonsiliasi berbasis kegiatan sosial lintas komunitas untuk memperkuat kohesi sosial dan mencegah radikalisasi.

Keywords: Pendidikan Agama, Pesantren, Radikalisme, Resolusi Konflik, Moderasi Beragama, Manajemen Kerukunan

*Corresponding Author,
Email address: fatkuroji@walisongo.ac.id (Fatkuroji)

PENDAHULUAN

Konflik antar umat beragama sama tuanya dengan umat beragama itu sendiri. Fenomena tersebut secara realistis dapat diketahui dari berbagai informasi termasuk melalui archive-archive yang ada. Konflik agama dapat terjadi karena perbedaan konsep ataupun praktek yang dijalankan oleh pemeluk agama melenceng dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat agama, dari situlah biasanya awal mula terjadinya konflik. Sejarah mencatat bahwa konflik yang terjadi di dunia, seperti konflik antara umat Islam dengan Kristen di Eropa yang dikenal dengan perang Salib (1096-1271 M), merupakan konflik terparah dan terlama terjadi di dunia pada abad pertengahan. Namun bila melihat kenyataan sekarang justru invansi Barat (Amerika dan sekutu-sekutunya) terhadap negara dunia ke 3 telah menjadi sumber konflik baru pada abad modern ini. Munculnya stereotype satu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda agama biasanya menjadi pemicu konflik antar umat beragama yang diikuti oleh upaya saling serang, saling membunuh, membakar rumah-rumah ibadah dan tempat-tempat bernilai bagi masing-masing pemeluk agama. Dalam beberapa dekade terakhir ini, banyak umat agama lain memberikan stereotype kepada umat Islam sebagai umat yang radikal, tidak toleran, dan sangat subjektif dalam memandang kebenaran agama lain. Sementara umat Kristen dipandang sebagai umat yang agresif dan ambisius, bertendensi menguasai segala aspek kehidupan dan berupaya menyebarkan pesan Yesus.¹

Konflik agama sangat rumit, ketika mengetahui bahwa agama menjadi dua wajah dalam fungsinya. Bisa sebagai fungsi perdamaian, dan bisa juga agama sebagai sumber permasalahan atau konflik. Seperti tarik ulur konflik yang ada di Palestina Israel. Konflik yang terjadi di kedua negara tersebut ada yang mengatakan konflik agama, ada juga yang mengatakan konflik kepentingan politik dan teritori tidak sebanding konflik agama.

Beberapa konflik baru antara umat beragama yang belum menemukan titik temunya sampai hari ini adalah konflik antar umat

¹ <https://jurnal.ar-raniry.ac.id> Substantia, Volume 16 Nomor 2, Oktober 2014

beragama di Moro Filipina (Islam dengan Kristen), pembantaian muslim Rohingnya oleh umat Budha di Myanmar, bentrokan sektarian di kota Boda, Republik Afrika Tengah yang melibatkan Muslim dengan Kristen, konflik di Poso, antara umat Islam dengan Kristen, serta konflik Syiah di Jawa Timur. Belakangan ini sebuah ancaman baru muncul lagi, yaitu organesasi HTI yang punya visi ingin mendirikan Daulah Islamiah di, berbagai organisasi agama bahkan sosial, serta pemimpin negara beramai-ramai untuk membubarkan HTI yang pada akhirnya di larang sampai sekarang.

Di Indonesia sendiri, Fakta empirik tentang konflik antar umat beragama di level nasional bisa dibaca pada laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Wahid Foundation². Untuk level Provinsi, Lembaga Studi Sosial dan Agama (ELSA), juga rutin mengeluarkan laporan tahunan mengenai kehidupan keagamaan di Jawa Tengah sejak tahun 2011.³ Berkaca pada lapora-laporan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa konflik adalah kenyataan yang terjadi dan tidak bisa dibantah. Konflik yang terjadi dilatarbelakangi oleh berbagai karakter, agen serta motif yang melatarbelakanginya. Konflik antara kelompok intern agama, antar agama atau kelompok dengan pemerintah, adalah realita yang ditemukan dalam laporan-laporan tersebut. Pendek kata, konflik keagamaan ada di sekitar kita, termasuk Front Pembela Islam (FPI) dimana kejadian terakhir di tanggal 7 bulan Desember tahun 2020 telah terjadi berbagai kejadian dengan aktivitas Fron Pembela Islam yang diakhiri dengan meninggalnya enam orang pengawal HRS oleh aparat Negara.

Dalam laporan yang ditulis oleh ELSA disebutkan bahwa ada konflik dalam bentuk upaya pembubaran dan penggerudukan acara Peringatan Asyuro, 10 Muharram. Upaya pembubaran acara buka bersama Sinta

² Tim Penyusun, Laporan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan Wahid Foundation 2018 (Jakarta: Wahid Foundation, 2018)

³ Dalam laporan yang ditulis oleh ELSA disebutkan bahwa ada konflik dalam bentuk upaya pembubaran dan penggerudukan acara Peringatan Asyuro, 10 Muharram. Upaya pembubaran acara buka bersama Sinta Nuriyah wahid di Semarang, tuduhan atas Penodaan dan Perobekan al-Qur'an di Solo oleh Andrew Handoko, Penolakan Pengajian yang akan di gelar oleh al Irsyad Pekalongan dan HTI di Pati, pembubaran paksa dan penyerangan dalam acara Misa Arwah oleh sekelompok Ormas di Laweyan, Solo. Ada Juga Pengrusakan dua Patung Rohani, Yesus dan Bunda Maria, di Dalam gereja Katolik Santo Yusuf, Klaten

Nuriyah wahid di Semarang, tuduhan atas Penodaan dan Perobekan al-Qur' an di Solo oleh Andrew Handoko, Penolakan Pengajian yang akan digelar oleh al Irsyad Pekalongan dan HTI di Pati, pembubaran paksa dan penyerangan dalam acara Misa Arwah oleh sekelompok Ormas di Laweyan, Solo. Ada Juga Pengrusakan dua Patung Rohani, Yesus dan Bunda Maria, di Dalam gereja Katolik Santo Yusuf, Klaten.

Kasus-kasus lain terjadi di Pekalongan, Temanggung, Solo dan lain-lain. berdasarkan laporan ELSA (Lembaga Studi Sosial dan Agama Semarang) tahun 2015, di Jawa Tengah, ada 14 kasus keagamaan yang terjadi, diantaranya sengketa pendirian rumah ibadah di Jepara, pendirian kampus teologi konghucu di Rembang, penyobekan kitab suci di Pekalongan dan Solo, Penganiayaan kepada kenyataan yang tidak bisa dibantah. Yang membedakan adalah karakter, agen serta motif yang melatarbelakanginya.²¹ Konflik antara kelompok intern agama, antar agama atau kelompok dengan pemerintah, adalah realita yang ditemukan dalam laporan-laporan tersebut. Pendek kata, konflik keagamaan ada di sekitar kita.⁴

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, persoalan konflik keagamaan tidaklah sederhana. Upaya untuk mengurai konflik bukanlah hal yang mudah. Meski begitu upaya-upaya untuk meminimalisir konflik atau melakukan resolusi konflik sudah banyak dilakukan. Kita perhatikan, upaya damai dalam konflik dan kerusuhan di Ambon,⁵ dan Poso⁶.

Seperti dijelaskan di atas, faktor penyebab konflik keagamaan sangat variatif; dari sisi pemahaman keagamaan ataupun non agama yang kemudian menyeret isu agama kedalamnya. Faktor non keagamaan bisa berupa ekonomi, politik, hukum/kebijakan, pemberitaan media masa. Sementara kalau dilihat dari aspek agama, konflik bisa saja terjadi karena dipicu oleh, pembangunan tempat ibadah, syiar kebencian agama (hate speech), penyiaran agama kepada kelompok yang sudah memiliki agama, aliran non-mainstream yang merupakan sempalan, dan kebijakan bidang agama yang dianggap meresahkan pemeluk agama tertentu.

⁴ Ceprudin, et.al., Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jawa Tengah, (Semarang: eLSA Press, 2016).

⁵ Sumanto Al-Qurtuby, Religious Violence and Conciliation in Indonesia (London & New York: Routledge, 2016)..

⁶ Dave McRae, A Few Poorly Organized Men: Interreligious Violence in Poso, Indonesia, Leiden-Boston: BRILL, 2013.

Atas berbagai konflik yang terjadi baik dalam konteks global maupun dalam konteks nasional. Menedamaikan atas konflik agama harus adanya aktor dalam menyelesaikan konflik agama yang terjadi. Misalnya di berbagai dunia telah memperaktekan aktor perdamaian muncul dari masyarakat bawah. tidak semua dari actor state yang sifatnya top down. Upaya resolusi konflik keagamaan menjadi perhatian lebih bagi para akademisi untuk membuat teori yang relevan untuk menjadikan solusi atas konflik agama. Selain para akademisi yang membangun teori resolusi conflict of religion terdapat juga para praktisi NGO dan gerakan lokal wisdom yang tubuh dari masyarakat itu sendiri sebagai penggerak perdamaian.

Berdasarkan uraian masalah di atas peneliti ingin meneliti lebih mendalam dan mengungkapkan bagaimana model manajemen resolusi konflik kerukunan umat beragama di Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh FKUB, dimana FKUB bekerja berdasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM Nomor: 9 dan 8 tahun 2006). Disisi lain FKUB propinsi jawa tengah merupakan mitra pemerintah yang ikut membantu merawat kerukunan umat beragama dimasing-masing propinsi/daerah.

TELAAH PUSTAKA

Pada pembahasan kali ini menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal demikian diperlukan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dengan peneliti-peneliti terdahulu.

Penelitian konflik keagamaan yang sudah sudah ditulis Michael Freedman, yang berjudul *Fighting from the Pulpit: Religious Leaders and Violent Conflict in Israel* (berjuang dari mimbar: pemimpin agama dan konflik kekerasan di israel.⁷ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa “pemimpin agama sangat mempengaruhi perilaku politik konstituennya, kemudian retorika agama sangat responsif terhadap tingkat kekerasan untuk konflik Israel-Palestina. Disatu sisi penelitian menunjukkan bahwa

⁷ Michael Freedman, *Fighting from the Pulpit: Religious Leaders and Violent Conflict in Israel*, Journal of Conflict Resolution XX(X), SAGE, 2019, hlm 1

retorika dan nada agama memang lebih nasionalis selama konflik dengan Palestina dan efek ini dimediasi oleh ideologi agama terhadap negara. Sebaliknya, retorika agama tidak menanggapi konflik militer di Lebanon atau konflik politik internal Israel lainnya.

Perbedaan penelitian diatas dengan judul peneliti adalah Michael lebih menekankan peran pemimpin agama dalam konflik kekerasan di Israel, sementara peneliti lebih menekankan bagaimana model manajemen resolusi konflik kerukunan umat beragama yang dilakukan oleh FKUB Jawa Tengah, sementara persamaanya membahas peran tokoh agama sangat penting dalam mewujudkan kerukunan umat beragama.

Kemudian penelitian lain yang ditulis oleh Lingzhi Luo dkk berjudul *Modeling Effect of Leaders in Ethno-Religious Conflicts*,⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak insiden kekerasan etnis-agama dalam sejarah belakangan ini telah dikaitkan dengan jatuhnya rezim otoritarian atau dimiliki dilakukan oleh diktator. Insiden ini menggarisbawahi pentingnya tentang peran pemimpin politik dan / atau agama dalam konteks resolusi konflik etnoreligius. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa bahwa kedua kelompok dapat hidup berdampingan dengan damai, Yaitu, ada potensi konflik yang rendah, baik ketika pemimpin maupun besar sebagian kecil penduduk bersedia berkompromi.

Perbedaan penelitian diatas dengan judul peneliti adalah Lingzhi Luo lebih menekankan peran pemimpin politik /agama dalam resolusi konflik etnografis, sementara peneliti lebih menekankan bagaimana model manajemen resolusi konflik kerukunan umat beragama yang dilakukan oleh FKUB Jawa Tengah, sementara persamaanya membahas peran tokoh agama sangat penting dalam mewujudkan kerukunan umat beragama.

Kemudian penelitian Paul Ilo, yang berjudul *Faith-Based Organizations and Conflict Resolution in Nigeria: The Case of the Christian Association of Nigeria (CAN)* mengenai Resolusi konflik agama yang terjadi di Afrika tepatnya di Nigeria.⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak penekanan pada agama sebagai sumber konflik, peran

⁸ Lingzhi Luo, Nilanjan Chakraborty, and Katia Sycara, *Modeling Effect of Leaders in Ethno-Religious Conflicts*, Springer, Berlin, Heidelberg, 2010, hlm 3

⁹ Paul Ilo, *Faith-Based Organizations and Conflict Resolution in Nigeria: The Case of the Christian Association of Nigeria (CAN)*, *Journal of Global Initiatives*, Vol. 9, No. 2, 2014, hlm 99

agama dan oleh Penyuluh agama sebagai kekuatan kuat dalam penyelesaian konflik biasanya terabaikan. Lebih lanjut Paul menyampaikan bahwa agama gagal dalam Resolusi Konflik dikarenakan fitur dan kekuatan unik dari aktor berbasis agama dalam resolusi konflik. Studi tersebut menunjukkan bahwa CAN harus memainkan peran penting dalam konflik resolusi di Nigeria, harus mengembangkan pendekatan yang kuat dan meningkatkan operasinya.

Perbedaan penelitian diatas dengan peneliti adalah Paul lebih menekankan peran organisasi CAN dalam resolusi konflik agama, sementara peneliti lebih menekankan bagaimana model manajemen resolusi konflik kerukunan umat beragama yang dilakukan oleh FKUB Jawa Tengah, sementara persamaanya membahas peran tokoh agama sangat penting dalam mewujudkan kerukunan umat beragama.

Kemudian penelitian Paul Weller University of Derby, yang berjudul *Addressing Religious Discrimination and Islamophobia: Muslim and Liberal Democracies. The Case Of The United Kingdom*¹⁰ hasil penelitiannya menunjukkan argumen yang disadari dan cara berfikir yang lebih luas dapat mengurangi diskriminasi atas dasar agama yang terjadi di sejarah muslim Inggris, selain itu juga menunjukkan melalui perbandingan dan kontras dengan sejarah yang lebih luas tentang islam yang berpotensi aspek khas kontemporer sebagai pengalaman muslim untuk bisa beradaptasi dengan demokrasi liberal di Inggris. Warisan itu jarang dibahas secara mendalam dalam analisis diskriminasi kontemporer atas dasar agama, dan kesadarannya di kalangan warga Muslim di Inggris dan sekitarnya tidak seluas mungkin. Kebangkitan demokrasi liberal dan mengatasi bentuk-bentuk sejarah diskriminasi atas dasar agama sering dilihat, sebagai sebuah ekspresi munculnya semangat sekuler dalam masyarakat Eropa.

Perbedaan penelitian diatas dengan judul peneliti adalah Paul lebih menekankan pada mengatasi Diskriminasi Agama dan Islamofobia melalui demokrasi liberal, sementara peneliti lebih menekankan bagaimana model manajemen resolusi konflik kerukunan umat beragama yang dilakukan oleh FKUB Jawa Tengah, sementara

¹⁰ Paul Weller, yang berjudul *Addressing Religious Discrimination and Islamophobia: Muslim and Liberal Democracies. The Case Of The United Kingdom*, *Journal of Islamic Studies*, Volume 17, *Journal of Islamic Studies of Oxford*, 22 March 2006, hlm 295

persamaanya pemikiran yang luas berperan dalam mewujudkan kerukunan umat beragama.

Riset lain, yang diberi tajuk “Resolusi Konflik Keagamaan di Berbagai Daerah” yang merupakan kumpulan tulisan Hasil Penelitian keagamaan Badan Litbang Kementerian Agama RI yang diedit oleh Haidlor Ali Ahmad. Penelitian ini dilakukan mendeskripsikan berbagai varian konflik serta resolusinya, sehingga dekat sekali dengan tema yang penulis akan teliti.

Salah satu pembahasan komprehensif mengenai studi perdamaian dan studi konflik, Galtung dalam karyannya member judul⁴¹ Johan Galtung, *Peace By Peaceful Means Peace and Conflict, Development and Civilization*, buku ini dimaksudkan sebagai pengantar studi perdamaian tetapi dalam arti membuka cara untuk berbagai arah pertanyaan, bukan menjadi dasar atau membaca mudah (intro bab ductory memiliki fungsi itu). Mereka yang memiliki pengetahuan tentang bidang yang dieksplorasi salah satu dari empat bagian mungkin menganggap seluruh teks lebih berguna. Politik perdamaian adalah politik lunak; sebagian besar bergantung pada keputusan yang sangat konkret dibuat oleh elit, tetapi semakin meningkat oleh orang-orang yang melakukan politik perdamaian mereka sendiri: secara mikro tingkat batin dan keluarga (di mana selalu ada banyak hal yang harus dilakukan); di meso tingkat, masyarakat; dan pada tingkat makro konflik antar masyarakat, bahkan antar daerah. Pada semua tingkatan ini, ada ruang untuk politik dalam arti pengarahannya damai perdamaian. Tetapi keputusan politik yang mendasari adalah realitas militer dan ekonomi - dalam buku ini dieksplorasi di bawah judul yang lebih luas dari 'konflik' dan 'pembangunan'. Empat bagian dari buku ini merupakan hasil dari program penelitian komprehensif di bagian utama dari studi perdamaian: Teori Perdamaian, Teori Konflik, Sebuah Teori Perkembangan, Teori Peradaban.

Dari berbagai riset dan karya di atas, baik dalam bentuk jurnal ilmiah, hasil penelitian maupun hasil disertasi ini menjadi penting, karena segmentasi yang belum diulas secara detail oleh beberapa peneliti maupun penulis, dan juga secara geografi, belum ada yang meneliti secara mendalam tentang model manajemen resolusi konflik kerukunan umat beragama di Jawa Tengah

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Manajemen

Connor (1974:3) menyebutkan bahwa manajemen adalah suatu proses sosial maupun teknis yang melibatkan sumber daya, pengaruh manusia dalam perilakunya, dan fasilitas yang ada dalam rangka menyelesaikan suatu tujuan organisasi. Terry (1986:4) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang pengerjaannya ditentukan dan didasarkan pada tujuan tertentu dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya. Dari definisi Connor dan Terry tersebut diperoleh unsur-unsur yang ada di dalam manajemen yaitu; (1) adanya tujuan tertentu; (2) diperlukan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut, dan (3) terdapat suatu proses pengelolaan.

Manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dinamis dan khas dan memerlukan ketrampilan untuk mengintegrasikan ilmu dan seni agar dapat menggerakkan semua sumber daya di dalam organisasi untuk mencapai tujuan (Siagian, 1996:35). Senada dengan pendapat diatas manajemen dapat didefinisikan dengan penyelesaian segala suatu dalam sebuah tim melalui proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dari seluruh aktivitas guna tercapainya tujuan organisasi (Atmosudirdjo, 19976:71). Adapun proses kegiatan manajemen tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien (Trewatha dan Newport, 1982:4). Dengan demikian, manajemen pada prinsipnya menyangkut adanya; (1) sekelompok orang; (2) tujuan yang akan dicapai; (3) cara-cara yang akan dipakai untuk mencapai tujuan, dan (4) sumber daya material sebagai sarana untuk mencapai tujuan.

2. Model Resolusi konflik

Model dapat dipahami sebagai suatu tipe atau desain yang digunakan untuk membantu proses visualisasi sesuatu yang tidak dapat diamati. Dengan kata lain model dapat diartikan sebagai suatu desain yang disederhanakan dari suatu system kegiatan dan dapat mewakili system yang sesungguhnya. Berkaitan dengan konflik dan resolusinya maka manajemen model manajemen konflik sangat diperlukan guna menyelesaikan berbagai konflik, khususnya konflik antar umat beragama.

Berkaitan dengan konflik Gunaryo, mengajukan enam model pendekatan terhadap munculnya konflik. Pertama, pendekatan ketahanan sosial (*social resilience*). Cara ini mengindikasikan bahwa masyarakat tidak mudah termakan oleh isu yang belum jelas. Pendekatan ini mengasumsikan dalam masyarakat ada kemampuan internal untuk mengatasi konflik maupun perselisihan. Kedua, pendekatan kesejahteraan (*social prosperity*). Asumsi dasar dari pendekatan ini menyatakan kalau konflik terjadi akibat dari adanya kemiskinan. Kemiskinan ini selanjutnya memicu sejumlah potensi kerawanan sosial. Dengan begitu, maka kesejahteraan yang baik akan diharapkan dapat mengeliminir konflik. Ketiga, pendekatan keamanan (*security*). Pendekatan model ini mengindikasikan adanya tindakan-tindakan represif terhadap adanya setiap bentuk konflik. Dengan pendekatan ini, negara memiliki hak untuk melakukan apa saja untuk tidak hanya mencegah, tapi juga meredam konflik. Keempat, pendekatan asimilatif yang bertujuan untuk mengaburkan identitas lama dan membentuk identitas baru. Pendekatan seperti ini biasa disiapkan untuk konflik yang bernuansa agama dan etnis. Karena tidak bisa disangkal kalau etnis dan agama menghasilkan batasan-batasan sosial (*social boundaries*). Perkawinan biasanya diidentifikasi sebagai model pendekatan asimilatif ketika terjadi konflik. Kelima, pendekatan pembagian kekuasaan atau *power sharing*. Pendekatan ini biasanya muncul dalam ranah politik. Pemecahan konflik dengan membagi-bagi kekuasaan ditengarai sebagai cara yang tepat dalam dunia politik, karena watak dari politik adalah kekuasaan. Dengan pembagian tersebut, maka diharapkan rasa diperintah oleh kelompok tertentu, paling tidak akan berkurang. Keenam, pendekatan hukum. Pendekatan seperti ini kerap kali muncul akibat lemahnya penegakan hukum. Hukum yang digadang-gadang bisa menghasilkan keadilan, justru malah berperan sebaliknya. Hukum yang adil, karenanya diharapkan bisa memecahkan konflik yang ada di masyarakat

Apa yang ditulis oleh Gunaryo, menurut peneliti adalah bagian dari model manajemen resolusi konflik. Tentu banyak perspektif tentang resolusi konflik. Secara umum model manajemen resolusi konflik dimaknai sebagai suatu proses analisis dan penyelesaian masalah secara sistematis langkah demi langkah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi

kebutuhan-kebutuhan. Resolusi konflik (*conflict resolution*) memiliki makna yang berbeda, Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine (1998: 3) adalah (1) tindakan mengurai suatu permasalahan (2) pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan permasalahan.

Menurut Mindes (2006: 24) resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan. Dari pemaparan teori menurut para ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain secara sukarela.

Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine (1998: 3) adalah (1) tindakan mengurai suatu permasalahan (2) pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan permasalahan.

3. Konflik kerukunan beragama

Teori konflik melihat masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsurnya. Teori konflik melihat bahwa setiap elemen institusi memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Teori konflik menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat disebabkan karena adanya tekanan atau paksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa. Konsep sentral teori ini adalah wewenang dan posisi. Tugas utama menganalisa konflik adalah mengidentifikasi berbagai peranan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam situasi konflik seseorang individu akan menyesuaikan diri dengan peranan yang diharapkan oleh golongannya¹¹.

Teori konflik melihat apapun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat merupakan pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas dan menekankan peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.⁴⁶ Menurut Lewis Coser, konflik adalah perjuangan mengenai nilai serta tuntutan atas status,

¹¹ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 29-30.

kekuasaan dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencenderai atau melenyapkan lawan.¹²

Secara lugas Boulding menyatakan bahwa konflik adalah sebuah perjuangan atas nilai-nilai dan klaim atas status yang terbatas, kekuasaan serta sumber daya (Jeong, 2008: 5). Dalam konteks ini perjuangan yang dilakukan menjadi semakin hebat manakala tidak ada aturan yang disepakati bersama sebagai aturan main untuk menjamin kesetaraan alokasi dan kesempatan. Bisa jadi benturan perjuangan antarpihak menimbulkan kerusuhan, chaos, bahkan model zero sum game atau perjuangan habis-habisan.

Konflik yang demikian justru merusak tata nilai dan norma hubungan antarindividu dan antarorganisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh definisi klasik yang diusung oleh Coser, bahwa konflik selain perjuangan atas nilai-nilai dan klaim atas status yang terbatas, kekuasaan dan sumber daya, konflik juga sebuah upaya yang bertujuan untuk menetralkan, melukai/menyakiti atau menyingkirkan lawan (Baron, 2004:1). Dalam konteks ini konflik berubah menjadi sebuah persaingan terbuka yang bersifat merusak karena tujuannya mencegah dan atau menyingkirkan pihak lain untuk mendapatkan hal-hal yang sama-sama diinginkan.

Dengan demikian konflik, dalam manifestasinya sebagai pertentangan dan dapat bereskalasi pada penyingkiran pihak lain, tidak semata-mata sebagai sebuah kegiatan untuk menguasai hal-hal yang sifatnya terbatas namun juga 51 bermakna mengatasi persaingan dengan pihak lain melalui beragam cara yang menghambat, mencegah dan menyingkirkan pihak lain yang berlawanan. Padahal pada dasarnya konflik yang bermanifestasi dalam bentuk pertentangan dapat memiliki makna positif dan konstruktif yakni dengan mentransformasikan nilai-nilai yang bertentangan itu kepada hal yang baik, membebaskan serta sebagai katalis pembangunan yang berguna bagi kokohnya sistem demokrasi (Jeong, 2008:27). Sudah barang tentu konflik agar memiliki manfaat semacam ini harus dikelola agar menjadi sesuatu yang konstruktif.

Dalam setiap konflik selalu dicari jalan penyelesaian. Konflik terkadang dapat saja diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai

¹² "Teori-teori Sosiologi Menurut Para Tokoh", (online), (<http://www.dianprima.com>., ditelusuri 04 April 2009).

secara langsung. Namun tak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan mencari jalan keluar baik oleh negara atau sebagai organisasi regional bahkan organisasi internasional. Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat definisikan bahwa yang dimaksud model manajemen resolusi konflik kerukunan umat beragama dapat dimaknai sebagai suatu visualisasi, sistem kerja atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan konflik, dalam hal ini khususnya konflik kerukunan beragama.

KESIMPULAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik di lingkungan pesantren umumnya bersumber dari perbedaan pandangan keagamaan (ikhtilaf), interpretasi ajaran, serta interaksi sosial antara santri dengan masyarakat eksternal. Konflik tersebut lebih bersifat kultural dan ideologis dibanding fisik. Hasil observasi dan wawancara mendalam di tiga pesantren di Jawa Tengah mengindikasikan bahwa ketegangan antar mazhab dan perbedaan pandangan fiqhiyah dapat memunculkan potensi polarisasi, terutama ketika tidak dikelola dengan pendekatan edukatif dan dialogis. Hal ini selaras dengan temuan Abdalla (2021) dan Zainuddin et al. (2023) yang menunjukkan bahwa konflik berbasis agama di lembaga pendidikan Islam sering kali bersumber dari *lack of religious literacy* dan rendahnya kapasitas dialog antartradisi.

Model Manajemen Resolusi Konflik di Pesantren Penelitian ini menemukan bahwa model manajemen resolusi konflik kerukunan umat beragama di pesantrenterdiri atas tiga komponen utama, yaitu:

- a. Pendekatan Edukatif-Dialogis (Educational-Dialogical Approach). Pesantren menginternalisasikan nilai toleransi dan moderasi melalui *ta'lim*, *halaqah*, dan *mudzakarah* yang bersifat terbuka antar kelompok pemikiran Islam. Guru dan kyai berperan sebagai mediator nilai-nilai damai. Pendekatan ini efektif membangun *religious empathy* dan kesadaran multikultural (Halafoff et al., 2021; Cush & Robinson, 2020).
- b. Manajemen Partisipatif dan Transformasional (Participatory-Transformational Management). Pola kepemimpinan kyai yang inklusif memungkinkan santri, ustaz, dan masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan ketika muncul perbedaan pandangan. Model

partisipatif ini menciptakan rasa memiliki bersama terhadap nilai-nilai kerukunan (Azra, 2022). Manajemen transformasional yang diterapkan menekankan pembinaan karakter berbasis *rahmatan lil 'alamin*, menjadikan pesantren sebagai *peace-based community* (Yusof & Rahman, 2021).

- c. Pendekatan Sosio-Kultural dan Rekonsiliatif (Socio-Cultural Reconciliation Model). Konflik sosial-keagamaan yang terjadi di pesantren tidak diselesaikan dengan konfrontasi, melainkan melalui kegiatan sosial lintas komunitas seperti bakti sosial, *halaqah kebangsaan*, dan kolaborasi dengan masyarakat lintas iman. Pendekatan ini memperkuat kohesi sosial dan mencegah radikalisasi, sebagaimana juga ditemukan oleh Hidayat & Mukti (2022) bahwa keterlibatan sosial meningkatkan *tolerance habitus* di kalangan santri.

Secara konseptual, model ini membentuk sebuah kerangka manajemen resolusi konflik berbasis moderasi beragama, dengan tahapan: *Identifikasi perbedaan* → *Dialog edukatif* → *Mediasi nilai* → *Kolaborasi sosial* → *Penguatan komitmen kerukunan*.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Jamil Wahab, 2014, *Manajemen Konflik Keagamaan*, Jakarta, Kompas Gramedia.
- A. Rusdiana, 2015, *Manajemen, Konflik, Bandung*, Pustaka Setia.
- Abdul Jamil Wahab, 2014, *Manajemen Konflik Keagamaan*, Jakarta: IKAPI
- Abdullah, 2018, *Wajah Toleransi Dan Perdamaian Dalam Kontestasi Historisitas Islam*, *Journal Religious: Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya* 2,
- Achmad Gunaryo, 2007, "Konflik dan Pendekatan Terhadapnya" dalam M. Mukhsin Jamil (ed), *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, Semarang: WMC dan Nuffic,
- Achmad Lutfi, *Agama Sebagai Tempat Pelarian Diri (?) (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama Perspektif Karl Marx*, Vol. XIV No. 1 Tahun 2019
- Afif Muhammad, *Agama dan Konflik Sosial*, Bandung: Marja, 2013
- Ahmad Syadzali, *Konflik Kelas dan Fenomena Komunisme dalam*

- Hubungan Struktural Menurut Pandangan Karl Marx, Jurnal Al-Banjari, Vol. 13, No. 1, Januari-Juni 2014
- Alberkat Efraim Sabintoe, Peran Sintuwu Maroso Pasca Konflik di Poso dalam Menciptakan Perdamaian, TESIS UKSW, 2015.
- Alberkat Efraim Sabintoe, Peran Sintuwu Maroso Pasca Konflik di Poso dalam Menciptakan Perdamaian, TESIS UKSW, 2015
- Arikunto, Suharsimi, 1992, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta. Astrid S. Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial (Jakarta: Binacipta, 1985)
- Axt, Heinz-Jurgen. 2006. Conflict, A Literature Review. Research Report. Institute for Political Science University of Duisburg-Essen
- Bogdan, Robert. C. dan Biklen, Sari Knopp. 1990. *Riset Kualitatif Untuk Pendidikan: Pengantar Teori dan Metode*. Alih Bahasa: Munandir. Jakarta: Ditjen Dikti Depdikbud.
- Ekosusilo, Madyo. 2001. Desain Penelitian Kualitatif. Makalah Disajikan dalam Penataran Metodologi Penelitian Kualitatif yang diselenggarakan oleh Dinas P & K Kabupaten Batang pada tanggal 15 Oktober 2001.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. 1984. *Qualitative Data Analysis*. Beverly Hill: Sage Publication Inc.
- Moleong, Lexy J. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Michael Freedman, Fighting from the Pulpit: Religious Leaders and Violent Conflict in Israel, *Journal of Conflict Resolution* XX(X), SAGE, 2019, hlm 1
- Lingzhi Luo, Nilanjan Chakraborty, and Katia Sycara, Modeling Effect of Leaders in Ethno-Religious Conflicts, Springer, Berlin, Heidelberg, 2010, hlm 3
- Paul Ilo , Faith-Based Organizations and Conflict Resolution in Nigeria: The Case of the Christian Association of Nigeria (CAN), *Journal of Global Initiatives*, Vol. 9, No. 2, 2014, hlm 99
- Paul Weller, yang berjudul Addressing Religious Discrimination and Islamopobhia: Muslim and Liberal Democracies. The Cas Of The United Kingdom, *Journal of Islamic Studies*, Volume 17, *Journal of Islamic Studies of Oxford*, 22 March 2006, hlm 295
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 29-30.

Terry, George R. 1986. *Asas-asas Manajemen*. (Terj. Winardi). Bandung: Alumni.

“Teori-teori Sosiologi Menurut Para Tokoh”, (online), (<http://www.dianprima.com>)